

### **BAB III**

## **PERKEMBANGAN KONDISI POLITIK MEKSIKO**

#### **A. Gambaran Umum Kondisi Politik Meksiko**

Pada dasarnya, Meksiko memiliki sistem pemerintahan yang serupa Amerika Serikat. Kedua negara merupakan negara republik federal dengan sistem pemisahan kekuasaan yang terbagi menjadi tiga cabang kekuasaan, menerapkan sistem *check and balances* serta sistem multipartai. (SRE,2019) Meksiko sendiri merupakan negara federasi yang terdiri dari tiga puluh satu negara bagian dan sebuah distrik federal Kota Meksiko. (Natalia,2017:1) Hukum tertinggi negara Meksiko didasarkan pada Konstitusi 1917. Berdasarkan Konstitusi 1917, kekuasaan terbagi menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan kekuasaan kehakiman. Lembaga eksekutif diduduki oleh jabatan presiden dan kabinet presidensi dengan masa jabatan enam tahun. Sementara itu, Kongres yang terdiri dari senator dan deputi menduduki jabatan dalam lembaga legislatif. Sistem *checks and balances* juga diterapkan di Meksiko guna membatasi kekuasaan masing-masing lembaga. (Kesselman,Krieger,&Joseph,2009:286)

Meski memiliki sistem pemerintahan yang serupa dengan Amerika Serikat, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam praktik pemerintahan di Meksiko. Perbedaan pertama terletak pada besarnya kekuasaan yang dipegang oleh lembaga eksekutif. Meski terdapat sistem pemisahan kekuasaan serta sistem *check and balance*, lembaga eksekutif atau lembaga kepresidenan Meksiko memegang peran dominan dalam mengendalikan kondisi politik di Meksiko. Sementara itu, dua lembaga lainnya yaitu Kongres (legislatif) dan lembaga peradilan (yudikatif) hanya bertindak sebagai peran pendukung. Hal tersebut tercermin dari kemampuan presiden untuk membangun kekuatan politik dengan menempatkan orang-orang tertentu untuk menduduki jabatan atau posisi-posisi kunci dalam pemerintahannya. Kekuatan presiden menjadi semakin besar dengan kekuasaannya untuk mengeluarkan dekrit maupun menyatakan keadaan darurat. (McCormick,2009:336)

Perbedaan selanjutnya terletak pada distribusi kekuasaan di Meksiko di mana konstitusi memberikan kekuasaan terhadap pemerintah federal untuk campur tangan dalam urusan di 31 negara bagian di Meksiko. Dengan kata lain, pemerintah federal memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan pemerintah di negara-negara bagian. Selain itu, kegiatan ekonomi dan politik yang terpusat di Mexico City di mana sekitar satu dari lima orang Meksiko tinggal di kota tersebut, menempatkan Mexico City sebagai kota yang memiliki pengaruh besar atas urusan nasional jauh melebihi kota-kota lain di negara tersebut. Hal tersebut mencerminkan distribusi kekuasaan yang tidak merata di Meksiko sehingga praktik politik Meksiko relatif bersifat otoriter. (McCormick,2009:337) Praktik politik yang cenderung otoriter tersebut tidak sesuai dengan hukum dasar negara Meksiko.

Konstitusi 1917 merupakan dasar hukum negara Meksiko. Konstitusi 1917 membentuk seperangkat Lembaga politik formal Meksiko. Konstitusi 1917 merupakan landasan hukum relatif mudah diubah di mana amandemen dapat dilakukan hanya dengan adanya dukungan dua pertiga anggota Kongres serta mayoritas lembaga legislatif negara bagian. (McCormick,2009:338) Meski demikian, Konstitusi 1917 memuat tiga prinsip inti yaitu nasionalisme ekonomi, pemisahan urusan antara gereja dan negara serta pembatasan kekuasaan terhadap tiga cabang pemerintahan di Meksiko.

Prinsip pertama yang berupa nasionalisme ekonomi dituangkan dalam kebijakan yang mencakup batasan pada investasi asing maupun kepemilikan asing atas tanah dan sumber daya alam lainnya, Terkait dengan kepemilikan sumber daya alam, hanya warga negara Meksiko atau pemerintah yang dapat memiliki tanah atau hak atas air dan sumber daya alam lainnya. Dengan kata lain, perekonomian Meksiko cenderung bersifat proteksionis. Meski demikian, tantangan globalisasi dan perkembangan ekonomi global menyebabkan Meksiko mulai meninggalkan prinsip tersebut dan membuka pasar dalam dunia internasional. (McCormick,2009:337) Selain itu, keikutsertaan Meksiko dalam NAFTA yang menekankan prinsip pasar bebas

semakin mendorong keterbukaan ekonomi di Meksiko. (Villareal & Fergusson,2015:2)

Prinsip kedua merupakan implementasi dari hasil pemikiran kaum liberal maupun konservatif untuk membatasi kekuatan gereja. Akan tetapi, pasca reformasi konstitusi pada tahun 1922, partisipasi gereja katolik dalam kegiatan sosial-politik di Meksiko meningkat melalui kegiatan kampanye yang menyuarakan keadilan sosial di Meksiko. Prinsip ketiga ditujukan untuk mencegah adanya akumulasi maupun monopoli kekuatan melalui berbagai peraturan seperti pembatasan masa jabatan presiden serta ketetapan bahwa anggota Kongres, pemerintah negara bagian maupun pemerintah lokal dilarang menduduki jabatan yang sama dalam periode yang berurutan. Meski demikian, praktik politik di Meksiko menunjukkan kenyataan yang berbeda. (McCormick,2009:338)

## **B. Dinamika Kondisi Politik di Meksiko**

Meksiko merupakan negara yang relatif bersifat otoriter dalam praktik pemerintahannya. Hal tersebut tercermin dari pemerintahan yang didominasi oleh satu partai politik dan kekuasaan pemerintah yang terpusat pada lembaga legislatif, khususnya Presiden. Selama beberapa dekade, sistem pemerintahan Meksiko dimonopoli oleh satu partai politik yaitu *Institutional Revolutionary Party* (PRI). Hal tersebut tampak dari kemenangan kandidat PRI dalam pemilihan presiden tahun 1934 hingga tahun 2000.

**Tabel 3.2 Jumlah Suara dalam Pemilihan Presiden di Meksiko Tahun 1934-2000 (Dalam Persen)**

Tahun	Jumlah Suara untuk Kandidat PRI	Jumlah Suara untuk Kandidat PAN	Jumlah Suara untuk Kandidat Partai Lain	Hasil (Jumlah Suara yang Memenuhi Syarat)
1934	98,2	-	1,8	53,6
1940	93,9	-	6,1	57,5
1946	77,9	-	22,1	42,6
1952	74,3	7,8	17,9	57,9
1958	90,4	9,4	0,2	49,4
1964	88,8	11,1	0,1	54,1
1970	83,3	13,9	1,4	63,9
1976	93,6	-	1,2	29,6
1982	71,0	15,7	9,4	66,1
1988	50,7	16,8	32,5	49,4
1994	50,1	26,7	23,2	77,16
2000	36,1	42,58	19,2	64,0
2006	22,2	35,9	35,3% untuk PRD dan 6,6% untuk partai lain.	58,1

**Sumber :** Kesselman, M., Krieger, J., & Joseph, W. A. (2009). *Introduction to Comparative Politics*. New York: Houghton Mifflin Harcourt.

Berdasarkan tabel di atas, pemilihan presiden selalu dimenangkan oleh kandidat PRI selama 64 tahun berturut-turut. Hal tersebut sekaligus menunjukkan dominasi PRI dalam sistem pemerintahan di Meksiko selama hampir 70 tahun. Dominasi tersebut dapat bertahan karena adanya monopoli politik di mana calon presiden dipilih sebagai kandidat melalui proses seleksi rahasia dalam PRI yang dikenal sebagai *dedazo*. (Needler,2006:544) Sistem tersebut memberi wewenang bagi presiden menyeleksi dan memilih kandidat penggantinya dari kabinet presidensinya.

Proses seleksi dimulai dengan penyerahan daftar pra-kandidat kepada ketua partai setelah berdiskusi dengan presiden sebelumnya, pemimpin partai, pemimpin militer, komunitas bisnis maupun gerakan buruh. Daftar tersebut kemudian dipublikasikan untuk mengukur opini publik dan mendorong debat publik. Nama penerus diumumkan setelah sekitar dua bulan debat dan sebuah konvensi partai akan meratifikasi hasil pemilihan. Presiden pengganti kemudian meluncurkan kampanye nasional untuk membangun pengakuan publik dan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin partai lokal. Meski demikian, hal tersebut merupakan sebuah bentuk formalitas untuk membangun pengakuan politik, sebab kemenangannya dalam pemilihan presiden sudah dapat dipastikan. (McCormick,2009:361) Selain itu, PRI juga memanipulasi sistem pemerintahan melalui campur tangan dalam pemilu dengan memberikan partai oposisi kursi yang cukup di Kongres untuk membuat mereka tetap kooperatif sehingga dominasi PRI dalam pemerintahan dapat bertahan. (McCormick,2009:347) Hal tersebut meninggalkan catatan buruk terhadap pemerintahan di bawah kekuasaan PRI di mana kekuasaan dimonopoli oleh satu partai politik yang tidak mencerminkan pelaksanaan demokrasi di Meksiko. Kemudian, PRI mulai kehilangan kepercayaan masyarakat pada tahun 1994 di mana inflasi menyebabkan peso kehilangan setengah nilainya terhadap dollar. Hal tersebut berdampak pada hilangnya kepercayaan para investor asing sehingga investasi asing secara masif melarikan diri dari negara itu. Implikasinya adalah roda perekonomian terhambat dan pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk membayar utangnya dan terjebak dalam krisis ekonomi yang dalam.

Pada tanggal 1 Januari 1994, gerakan gerilya, Tentara Pembebasan Nasional Zapatista (EZLN), merebut empat kota di negara bagian selatan Chiapas. Kelompok itu menuntut tanah, demokrasi, hak-hak adat, dan pencabutan segera NAFTA. Banyak warga di seluruh negeri secara terbuka mendukung tujuan pemberontak, menunjukkan bahwa gerakan itu menerangi dua realitas Meksiko yang berbeda di mana kalangan elit mendapat hak istimewa sedangkan warga lainnya hidup dalam

kemiskinan dan penindasan. Pemerintah dan militer juga dikritik karena tidak bertindak dan adanya pelanggaran hak asasi manusia di Chiapas. Menyusul setelah pemberontakan terjadi pembunuhan calon presiden PRI, Luis Donaldo Colosi. Pembunuhan itu mengejutkan semua warga negara dan mengguncang elit politik secara mendalam. Pembunuhan itu membuka celah lebar di dalam PRI dan mengeluarkan banyak spekulasi dan ketidakpercayaan di antara para calon presiden PRI. Hal itu menimbulkan kecurigaan banyak warga Meksiko bahwa pembunuhan itu adalah bagian dari konspirasi kelompok garis keras politik yang menentang segala bentuk transformasi demokratis. Akibatnya, citra PRI di kalangan masyarakat Meksiko menjadi semakin memburuk sehingga banyak kalangan masyarakat yang mulai menuntut demokratisasi di Meksiko. Meski demikian, ketakutan akan kekerasan memberi dukungan kuat kepada PRI dalam pemilihan Agustus 1994.

PRI kehilangan mayoritasnya pada pemilu tahun 1996 di mana partai oposisi mulai mendapat dukungan politik dari masyarakat Meksiko. Bahkan, partai-partai oposisi telah memenangkan jabatan gubernur dan walikota yang penting. Hal tersebut merupakan bentuk respon kekecewaan masyarakat terhadap ketidakstabilan ekonomi-politik yang terjadi di bawah kekuasaan PRI. (Kesselman, Krieger, & Joseph, 2009:274) Kemenangan PAN dalam pemilu tahun 2000 menyebabkan tradisi pemerintahan otoriter panjang ini berakhir. Hal tersebut juga didukung oleh kebijakan Ernesto Zedillo untuk menciptakan pemilihan yang lebih adil di Meksiko di mana semua pemilih terdaftar akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Hasilnya adalah ketiga partai besar memilih kandidat mereka untuk pemilihan presiden dalam pemilihan tahun 2000. (McCormick, 2009:341) Pemilihan tahun 2000 dan 2006 menandai tahap baru dalam upaya Meksiko untuk demokrasi. Setelah pemilu tahun 2000, pemilihan presiden pada periode selanjutnya dimenangkan oleh kandidat dari PAN (Partai Aksi Nasional). Meski demikian, stagnansi kondisi ekonomi dan politik pada masa kekuasaan PAN akibat kurangnya pengalaman dan dukungan politik dari kongres menjadi celah bagi

bangkitnya kembali PRI dalam pemerintahan Meksiko. (VOA, 2012)

PRI kembali memperoleh momentumnya pada pemilu tahun 2012. Keunggulan PRI mulai tampak pada kemenangan Fausto Vallejo dari partai PRI terhadap Luisa Maria Calderon dari Partai Aksi Nasional (PAN) di negara bagian asal presiden, Michoacan. dengan perolehan suara 35 persen dibanding 33 persen. Sementara, Silvano Aureoles, calon dari Partai Revolusi Demokratis (PRD) berada di tempat ketiga dengan peroleh suara sebesar 29 persen. Partai oposisi Partai Revolusioner Institusional (PRI) berusaha kembali menduduki kursi presiden tahun pada pemilu tahun 2012 setelah menjadi oposisi selama 12 tahun. PRI kalah dalam pilpres tahun 2000 dari Vicente Fox setelah memimpin Meksiko selama 71 tahun. Pada pemilu tahun 2006, kandidat dari PAN yaitu Felipe Calderon kembali memperoleh kemenangan suara untuk memimpin Meksiko. Para pengamat mengatakan bahwa kekalahan PRI pada dua periode pemilu sebelumnya itu akan mendorong PRI untuk merebut kembali kekuasaannya melalui pilpres tahun 2012 di mana Enrique Peña Nieto menjadi kandidat utama. (VOA, 2011) Dengan kata lain, pemilihan presiden tahun 2012 turut diwarnai dengan kepentingan PRI untuk memperbaiki citra dan memperoleh kembali kekuasaannya dalam pemerintahan di Meksiko. Enrique Peña Nieto sebagai kandidat dari PRI kemudian muncul sebagai pemenang dalam Pemilihan Presiden tahun 2012 dan dilantik menjadi Presiden Meksiko pada 1 Desember 2012.

### **C. Arah Kebijakan Presiden PRI, Enrique Peña Nieto**

Sebelum menjabat sebagai Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto memulai karir politiknya dengan bergabung dalam *Institutional Revolutionary Party* (PRI) pada tahun 1984. Selain itu, Peña Nieto telah aktif dalam bidang layanan publik pada usia dini dengan menduduki beberapa posisi dalam pemerintahan negara bagian di Meksiko. Pada tahun 1993 dan 1998, Peña Nieto menjabat sebagai kepala staf dan sekretaris pribadi Sekretaris Pengembangan Ekonomi Negara Meksiko, Montiel Rojas. (Sosa, 2014) Setelah tahun 1999, karir politik

Peña Nieto semakin berkembang. Hal tersebut tercermin dari perubahan jabatan Peña Nieto yang sebelumnya menduduki posisi sekretaris pada tingkat rendah ke tingkat yang lebih tinggi di mana Peña Nieto menjabat sebagai Sub-sekretaris Pemerintah pada tahun 1999 hingga 2000. Kemudian, Beliau menduduki jabatan Sekretaris Administrasi pada tahun 2000 hingga 2002 dan terpilih menjadi Koordinator Kelompok Parlemen dari Partai Revolusi Institusional pada tahun 2003 hingga 2004.

Pada tahun 2005, Enrique Peña Nieto mencalonkan diri sebagai gubernur Negara Bagian Meksiko. Ia berkomitmen untuk berfokus pada pembangunan, khususnya dalam sektor kesehatan dan pendidikan maupun pembangunan infrastruktur layanan publik seperti jalan dan rumah sakit sejak masa kampanyenya. Enrique Peña Nieto kemudian terpilih menjadi gubernur Negara Bagian Meksiko di teater Morelos di Toluca selama periode 16 September 2005 hingga 15 September 2011. (The Presidency President : Profile of President Enrique Peña Nieto., 2014) Selama masa jabatannya sebagai gubernur, Enrique Peña Nieto berhasil meraih berbagai pencapaian. Kepemimpinan Peña Nieto sebagai gubernur berhasil merealisasikan berbagai proyek pembangunan jalan raya, rumah sakit serta menciptakan sistem air yang memadai untuk menyediakan air bersih.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, proyek pembangunan 196 rumah sakit dan pusat kesehatan berhasil terealisasi. Pembangunan tersebut berhasil mengurangi angka kematian yang disebabkan oleh penyakit pernapasan sebesar 55%. Sementara itu, kematian yang disebabkan oleh disentri berkurang 68% dan kematian akibat kanker serviks berkurang 25%. Selain itu, kepemimpinan Peña Nieto sebagai gubernur berhasil merealisasikan proyek utama transportasi umum yaitu Kereta Api Pinggiran Kota Wilayah Metropolitan Mexico dan "Mexibús" yang menyediakan layanan kepada lebih dari 300.000 orang setiap hari. Berbagai dana pembangunan tersebut dicapai melalui restrukturisasi keuangan di Negara Bagian Mexico dengan memperluas basis pajak. Restrukturisasi tersebut juga berhasil mencegah meningkatnya hutang pada kepemimpinan Peña Nieto. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Peña Nieto sebagai



gubernur dinilai cukup berhasil. Keberhasilan Peña Nieto sebagai gubernur negara bagian Meksiko menghantarkannya pada keberhasilan dalam pemilihan Presiden di Meksiko pada tahun 2012. Enrique Peña Nieto kemudian berhasil memenangkan pemilihan Presiden dan resmi menjabat sebagai Presiden Meksiko pada 1 Desember 2012 setelah kampanye pemilihan yang intens di mana pada saat itu Andrés Manuel López Obrador menjadi kandidat lawan dari PRD (The Presidency President : Profile of President Enrique Peña Nieto.,2014)

Arah kebijakan Presiden Enrique Peña Nieto telah dikemukakan sejak masa kampanyenya. Enrique Peña Nieto mengemukakan bahwa ia akan mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis dengan memberikan peluang yang lebih adil bagi partai politik di Meksiko untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Selain itu, kebijakannya akan berfokus pada masalah ekonomi dan perang melawan narkoba. Hal tersebut menyebabkan Peña Nieto dianggap sebagai wajah baru PRI yang menggeser citra buruk PRI atas masa lalu partai yang suram dan sering dikaitkan dengan geng narkoba. (VOA, 2011) Dengan kata lain, Presiden Enrique Peña Nieto menjadi lambang transformasi pemerintahan yang lebih demokratis di bawah PRI. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan penciptaan pakta multilateral Meksiko yang disampaikan oleh Presiden Enrique Peña Nieto dalam wawancaranya dengan Robert E. Rubin. Berdasarkan wawancara tersebut, Presiden Enrique Peña Nieto menyampaikan bahwa kepemimpinan Presiden Enrique Peña Nieto telah menciptakan negara yang majemuk dan beragam dalam partisipasi politiknya. Hal itu diimplementasikan dengan memberikan ruang kepada partai politik di Meksiko untuk berpartisipasi dalam pemerintahan untuk menciptakan kongres yang pluralistik sehingga tidak ada satu partai yang memegang mayoritas dan mendominasi kekuasaan. (CFR,2014) Dengan kata lain, kepemimpinan Presiden Enrique Peña Nieto mengadopsi prinsip demokrasi dalam pemerintahannya. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka merealisasikan janji kampanye Presiden Enrique Peña Nieto untuk mewujudkan pemerintahan

yang lebih demokratis sekaligus memperbaiki citra PRI dalam pemerintahan di Meksiko.

Sedangkan dalam kebijakan ekonomi, Presiden Enrique Peña Nieto pada dasarnya mengadopsi prinsip liberalisme ekonomi di mana ia mendukung masuknya investasi asing, khususnya dalam industri manufaktur. Bahkan, Presiden Enrique Peña Nieto berencana untuk membuka investasi asing di sektor energi. Meski demikian, kebijakan tersebut tidak direalisasikan karena besarnya kontra terhadap kebijakan tersebut. Sementara itu, kebijakan untuk mendukung investasi asing, khususnya dalam industri manufaktur berhasil menciptakan perkembangan pesat industri manufaktur mobil di Meksiko pada masa kepemimpinan Enrique Peña Nieto di mana mitra NAFTA, khususnya Amerika Serikat menyumbang sebagian besar investasi asing di Meksiko. Maka dari itu, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa arah kebijakan Presiden Enrique Peña Nieto cenderung pro terhadap NAFTA sebagai salah satu fasilitator terbesar dalam menarik investasi asing di Meksiko.

Perkembangan pesat tersebut ditunjukkan dari peningkatan investasi di sektor ini yang mencapai lebih dari US\$ 10 miliar pada tahun 2014. Pada tahun 2013, Audi mulai membangun pabrik US\$ 1,3 miliar di dekat Puebla. Kemudian Presiden Enrique Peña Nieto mengumumkan rencana pembangunan pabrik senilai US\$ 1 miliar di Nuevo León oleh Kia Motors pada Agustus 2014. Pada saat itu, Mercedes-Benz dan Nissan telah membangun pabrik senilai US\$ 1,4 miliar di daerah Puebla, sementara BMW merencanakan pabrik perakitan senilai US\$ 1 miliar di San Luis Potosi. Pada Desember 2014, total investasi di sektor otomotif Meksiko mencapai US\$ 19 miliar. (Wiegmann, 2015) Hal tersebut menunjukkan kontribusi dari arah kebijakan ekonomi liberal dan sejalan dengan prinsip NAFTA yang diterapkan oleh Meksiko di bawah kepemimpinan Enrique Peña Nieto.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kepemimpinan Enrique Peña Nieto menerapkan prinsip demokrasi dan liberalisasi ekonomi dalam menjalankan pemerintahannya di mana prinsip tersebut memiliki kaitan erat dengan prinsip perjanjian NAFTA. Hal tersebut dapat dilihat dari

kebijakan pembukaan terhadap investasi asing, khususnya pada sektor manufaktur di mana sebagian besar investasi asing Meksiko berasal dari negara mitra NAFTA, khususnya Amerika Serikat. Dengan kata lain, arah kebijakan Presiden Enrique Peña Nieto dapat dikatakan pro terhadap ketentuan NAFTA. Selain berkontribusi dalam memberikan dorongan bagi perekonomian Meksiko, kebijakan mempertahankan NAFTA juga dapat menjadi sarana untuk mengimplementasikan janji kampanye Presiden Enrique Peña Nieto untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut disebabkan karena terdapat keterkaitan antara kerja sama perdagangan bebas dengan demokrasi di mana kemitraan perdagangan bebas membawa serta tekanan yang lebih besar untuk reformasi demokratis. Keterkaitan liberalisme perdagangan dan demokrasi dapat ditelaah dengan peristiwa globalisasi. Menurut Jan Aart Scholte dalam tulisannya yang berjudul *Globalization and (Un) Democracy*, ia mengatakan bahwa globalisasi telah mendorong terjadinya proses demokratisasi dengan mempromosikan nilai-nilai kebebasan global atau pandangan neo-liberal termasuk dalam nilai-nilai perdagangan bebas. (Scholte,2000:261) Implementasi NAFTA berarti implementasi perdagangan bebas yang mengadopsi nilai-nilai ekonomi liberal. Perdagangan bebas menunjukkan adanya persaingan bebas yang berarti terdapat kebebasan individu dalam sektor ekonomi. Hal tersebut didukung dengan kebijakan pembentukan pakta multilateral Meksiko yang memberikan peluang besar bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam pemerintahan Meksiko. Artinya ada kebebasan dalam sektor ekonomi dan politik di mana kedua hal tersebut merupakan beberapa dasar dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis. Maka dari itu, secara tidak langsung implementasi NAFTA mendukung berlangsungnya demokrasi di Meksiko. Dengan demikian, NAFTA dapat dikatakan memegang peran penting dalam mempromosikan demokrasi sekaligus kepentingan ekonomi di Meksiko. Mempertahankan NAFTA sekaligus menandakan keberlangsungan proses demokrasi di Meksiko sehingga dapat menjadi salah satu alat bagi untuk membuktikan janji kampanye Enrique Peña Nieto untuk mewujudkan pemerintahan yang

demokratis dan liberal. Selain itu, implementasi demokrasi di Meksiko di bawah kekuasaan PRI ini dapat menggeser citra buruk PRI akibat pemerintahannya yang otoriter di masa lalu. Dengan demikian, kebijakan untuk mempertahankan NAFTA dapat menjadi kebijakan yang dinilai rasional bagi pemerintahan Enrique Peña Nieto.